

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK
HUNI UNTUK MASYARAKAT KURANG MAMPU DI
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN
HILIR PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

OLEH :

SAFI'I

12.851.0001

PROGRAM ILMU PEMERINTAHAN



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK
HUNI UNTUK MASYARAKAT KURANG MAMPU DI
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN
HILIR PROVINSI RIAU**

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

Access From (repository.uma.ac.id)

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni
Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan
Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Nama : Safi'i

NPM : 12.851.0001

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Abdul Kadir M.Si)

(Yurial Arief Lubis S.Sos, M.IP)

Mengetahui

Dekan

K.a Prodi



(Dr. Heri Kusmanto, MA)

(Yurial Arief Lubis S.Sos, M.IP)

Tanggal Sidang Meja Hijau

9 April 2019

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukannya adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, April 2019



Safi'i
12 851 0001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Safi'i
NPM : 128510001
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 28 April 2019

Yang menyatakan



Safi'i

12.851.0001

ABSTRAK

Bantuan program rumah layak huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir belum berjalan optimal, hal ini di karenakan belum tepatnya sasaran bantuan rumah layak huni dan pendaftaran penerima rumah layak huni tidak adil. serta penerima rumah bantuan layak huni juga harus memiliki tanah sendiri sehingga terlaksananya pembangunan rumah, padahal masyarakat sekitar yang kurang mampu tidak memiliki tanah untuk pembangunan rumah apalagi dengan harga tanah yang semakin tinggi. Dengan rumusan masalah penelitian ialah, Bagaimana Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni untuk masyarakat kurang mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Serta adanya tujuan penelitian ialah, untuk mengetahui implementasi bantuan rumah layak huni di Kecamatan Bagan Sinembah dan apa-apa saja faktor yang mempengaruhinya. Dengan menggunakan metode penelitian secara Kualitatif.

Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tidak berjalan dengan optimal, jika dilihat dari penyampaian sosialisasi yang tidak menyeluruh dan tidak tepat sasaran, dan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang belum memadai serta kurangnya pemahaman dan keahlian aparat pelaksana dalam pembangunan. Dengan Hambatan dalam Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau ialah terkait sumber daya yang dilihat dari sumber daya manusia yang tidak memiliki keahlian dan kemampuan dalam pembangunan rumah layak huni, tidak tepatnya sasaran dalam pelaksanaan pembangunan rumah kepada masyarakat kurang mampu, fasilitas dalam pembangunan rumah layak huni tidak memadai, dan minimnya anggaran dalam pembangunan rumah layak huni serta dari Dimensi Struktur Birokrasi terkait tidak adanya SOP dalam pembangunan tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Masyarakat Kurang Mampu dan Rumah Layak Huni.

ABSTRACT

Assistance for livable housing programs in Bagan Sinembah sub-district, Rokan Hilir Regency has not been running optimally, this is due to the inaccurate targeting of housing assistance and unfair housing registration. as well as beneficiary housing beneficiaries must also own their own land so that housing construction can be carried out, even though the less fortunate communities do not have land for housing construction especially with the higher land prices. With the formulation of the research problem is, How is the Implementation of the Program for Assistance for Livable Houses for poor people in the District of Bagan Sinembah, Rokan Hilir Regency and what are the obstacles in the implementation of the Program for Liveable Settlement in the Bagan Sinembah District, Rokan Hilir Regency. As well as the purpose of the research is, to determine the implementation of livable housing assistance in Bagan Sinembah District and what are the factors that influence it. By using qualitative research methods.

The Implementation of a Decent Living Assistance Program for Underprivileged Communities in Bagan Sinembah Subdistrict, Rokan Hilir Regency, Riau Province is not running optimally, if seen from the delivery of socialization that is not comprehensive and not on target, and the budget for implementing inadequate housing construction that is inadequate and lacking understanding and expertise of the implementing apparatus in development. With Obstacles in the Implementation of Assistance for Livable Houses for Underprivileged Communities in Bagan Sinembah Subdistrict, Rokan Hilir Regency, Riau Province is related to resources seen from human resources who do not have the expertise and capabilities in the construction of livable homes, not exactly the target in the implementation of development houses to the underprivileged, inadequate housing facilities are inadequate, and the lack of a budget in the construction of livable homes as well as from the Dimension of the Bureaucratic Structure related to the absence of SOPs in the construction.

Keywords: Implementation, Poor People and Livable Houses.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hadirkan kepada ALLAH SWT, yang sampai sekarang ini penulis masih diberikan kesehatan taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang berderang. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat pembuatan tugas akhir yang mana tujuannya memperoleh gelar sarjana pada program “ Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul yang diajukan oleh penulis ialah **“Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau”**.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan . penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini kurang dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membantu dan mendukung dari pembaca. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya tulis ini di antaranya :

1. Kepala Yayasan H.Agus Salim Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr.Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr.Abdul Kadir SH, M.Si selaku pembimbing I yang selama ini telah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya demi membimbing saya dengan penuh semangat.
4. Bapak Yurial Arief Lubis S.Sos, M.IP selaku pembimbing II yang telah mencurahkan perhatian, motivasi, waktu, tenaga dan doa serta rasa kepercayaan yang sangat berarti bagi saya.
5. Kepada Bapak Rholand Muary S.Sos, M.Si yang telah memberikan saran, arahan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mengajarkan dan mendidik penulis banyak hal tentang dunia perpolitikan dan pemerintahan sehingga turut berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi serta memberikan perkembangan informasi berupa jadwal di dalam pelaksanaan setiap acara kegiatan atau aktivitas di dalam penyelesaian skripsi.
8. Untuk seluruh pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan terbaik saat peminjaman buku.
9. Dan untuk yang teristimewa dalam kehidupan dunia dan akhirat saya, yaitu kedua orang tua saya, ayah saya tercinta dan ibu saya tercinta yang merupakan sumber kebahagiaan, sumber inspirasi serta motivator terbaik yang menjadikan saya menjadi manusia Yang lebih bermanfaat bagi sekitar serta menjadi kebanggaan dalam keluarga, sosok yang sabar dan penuh kasih sayang

terhadap sesama, dan semua doa, pengorbanan, perjuangan, keringat dan air mata mereka yang membuat saya berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana ini.

10. Untuk saudara-saudara saya yang selama ini selalu memberikan doa, dukungan dan semangat dalam pekerjaan skripsi ini.
11. Pihak dari Pemerintahan Kecamatan Bagan Sinembah terutama untuk bapak H.Darsono SE, dan Bapak M.Hasbi yang telah memberikan kesempatan, waktu dan tempat bagi penulis untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat selesai.
12. Pihak masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis, sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan yang selama ini bersama – sama dalam menyusun skripsi terimakasih untuk doa, dukungan dan motivasinya.
14. Dan saya ucapkan kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung memberikan motivasi, semangat dan doanya sehingga penyusunan skripsi ini selesai.

Medan, 10 Februari 2019

Safi'i

12.851.0001

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Program	7
2.2 Implementasi	8
2.2.1. Implementasi Kebijakan Publik	9
2.2.2. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik	10
2.2.3. Tingkatan Dalam Kebijakan Publik	11
2.2.4. Konsep dalam Implementasi Kebijakan	15
2.3. Model Implementasi George C.Edwards III	17
2.4. Teori Kemiskinan	19
2.4.1. Ciri-ciri Kemiskinan	20
2.4.2. Dimensi Kemiskinan	21
2.5. Pengertian Rumah Layak Huni	22
2.5.1. Rumah Tinggal Layak Huni	23
2.6. Kecamatan	24
2.6.1. Tugas Camat	25
2.7 Kerangka Pemikiran	27
2.8 Penelitian yang Relevan	28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi & Waktu Penelitian	30
3.1.1 Jenis Penelitian	30
3.1.2 Sifat Penelitian	31
3.1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.2 Teknik Pengumpulan Data	32
3.3 Teknik Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1. Kondisi Umum Kecamatan Bagan Sinembah	36
4.1.2. Visi dan Misi Kecamatan Bagan Sinembah	36
4.1.3. Kondisi Geografis	38
4.1.4. Keadaan Demografis	38
4.1.5. Keadaan Demografi Menurut Usia	40
4.1.6. Pendidikan	40
4.1.7. Mata Pencaharian	42
4.1.8. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bagan Sinembah	43
4.2. Hasil Pembahasan	56
4.2.1. Implementasi Program Rumah Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu	56
4.2.2. Hambatan Implementasi Program Rumah Bantuan Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	74
5.2. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Bagan Sinembah.....	39
Tabel 4.2. Usia Penduduk Kecamatan Bagan Sinembah	40
Tabel 4.3. Sarana dan Prasarana Kecamatan Bagan Sinembah	41
Tabel 4.4. Penduduk Menurut Mata Pencaharian	43
Tabel 4.5. Penduduk Kecamatan Bagan Sinembah Tahun 2016	57



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Kerangka Pemikiran.....	27
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pemohon Bantuan Program Rumah Layak Huni Tahun 2016
2. Daftar Penerima Bantuan Program Rumah Layak Huni Tahun 2016
3. Dokumentasi
4. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Bagak Sinembah
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau
5. Peraturan Bupati Rokan Hilir No 9 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Kemiskinan di Indonesia bukan hal yang baru kita lihat dan kita dengar, angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan Negara tetangga maupun di Asia. Berbagai macam program telah dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi angka kemiskinan di Negara ini, namun hal ini sepertinya tidak kunjung berkesudahan. Kemiskinan merupakan fenomena global yang sangat memprihatinkan, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi perekonomian Negara Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah yang ada umumnya dihadapi hampir di semua Negara-negara berkembang, terutama Negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga Negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidak mampuannya memenuhi kebutuhan hidup, baik maupun akibat ketidak mampuan Negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya (Edi Suharto, 2009:16).

Kemiskinan adalah kondisi yang mengganggu kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang tidak tetap, rendahnya lapangan kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya rumah. Mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menanggulunginya. Adapun program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yaitu melalui program bantuan rumah yang layak huni terhadap masyarakat miskin/kurang mampu. Hak pemenuhan atas rumah menjadi salah satu komponen penting yang perlu di perhatikan pemerintah karena kondisi rumah yang dimiliki masyarakat kurang mampu dibangun dengan tidak memperhatikan kriteria fisik rumah yang layak huni yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah layak huni.

Menurut pasal I ayat (7) No 1 Tahun 2011 tentang perumahan, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah tangga sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Salah satu Kabupaten yang melaksanakan Program rumah layak huni adalah Kabupaten Rokan Hilir. Program rumah layak huni di Kabupaten Rokan Hilir di mulai pada tahun 2006. Program ini merupakan program pemerintah Kabupaten Rokan Hilir guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat di daerahnya, dimana hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Program ini memberikan bantuan berupa pembangunan rumah layak huni yang dibangun atau terletak di atas tanah milik masyarakat yang kurang mampu. Program rumah layak huni dananya bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hilir. Tujuan program rumah layak huni adalah untuk membantu masyarakat kurang mampu yang belum memiliki rumah layak huni atau tidak memiliki rumah dan mempunyai tanah milik sendiri atau hibah. Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni dilakukan pada Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Dan dalam tingkat Kabupaten Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Rokan Hilir yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. BAPEMAS sebagai pelaksana teknis yang bertugas memberi sosialisasi tentang penyusunan daftar rencana kegiatan dan membantu pencairan dana bantuan rumah layak huni. Sedangkan pada setiap desanya dibuat organisasi kelompok masyarakat (POKMAS) yang menangani dan bertanggung jawab tentang pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni pada setiap desanya.

Salah satu Kecamatan yang melaksanakan program rumah layak huni di Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Bagan Sinembah yang terdiri dari 33 Kelurahan. Semua Kelurahan di Kecamatan Bagan Sinembah setiap tahun

mendapatkan bantuan rumah layak huni. Penduduk di Kecamatan Bagan Sinembah mayoritas berprofesi sebagai petani, yang mana dari sebagian masyarakat belum mempunyai rumah sendiri atau rumah mereka masih jauh dari kriteria layak.

Adapun kriteria untuk ukuran sederhana rumah layak huni yang dibangun yaitu rumah dilengkapi fasilitas MCK (mandi, cuci kakus). Sedangkan persyaratan atau kriteria masyarakat miskin yang berhak mendapatkan rumah sederhana layak huni antara lain :

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)
2. Memiliki Kartu Keluarga (KK)
3. Kondisi rumahnya telah rusak atau tidak layak ditempati
4. Mata pencaharian petani atau buruh
5. Membuat surat tanah milik pribadi/hibah]kepala keluarga dalam keadaan cacat fisik

Adapun realisasi program rumah layak huni pada Tahun 2018 mendapatkan rumah bantuan layak huni sebanyak enam unit. Padahal bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh warga, pasalnya masih banyak warga yang tinggal di perumahan kurang layak. Berdasarkan pengamatan penulis menemukan adanya fenomena-fenomena di dalam pelaksanaan bantuan program rumah layak huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

1. Belum tepatnya sasaran bantuan rumah layak huni.
2. Tidak tepatnya cara dalam penentuan yang berhak mendapatkan program rumah layak huni (masih terdapat ketidakadilan dalam masyarakat)

Selain hal tersebut, peneliti juga menemukan permasalahan-permasalahan lainnya terkait penerimaan dan persyaratan dalam program bantuan rumah layak huni. Yang mana pada saat ini penerima rumah bantuan layak huni harus memiliki tanah sendiri sehingga terlaksananya pembangunan rumah, padahal masyarakat sekitar yang kurang mampu tidak memiliki tanah untuk pembangunan rumah apalagi dengan harga tanah yang semakin tinggi. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat urgent dalam program bantuan rumah layak huni.

Berdasarkan keterangan dan fenomena-fenomena yang terjadi diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau”**.

1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni untuk masyarakat kurang mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir?

1.3.Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah, tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni untuk masyarakat kurang mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir
2. Untuk menganalisis Hambatan dalam pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

1.4.Manfaat Penelitian

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui penelitian ini serta menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan.
2. Sebagai masukan serta informasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan.
3. Sebagai bahan informasi bagi penulis yang akan melakukan penelitian yang sama pada masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Program

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program sebagai berikut : *“A programme is collection of interrelated project design to harmonize and integrated various action an activities for achieving overall policy objectives”*. (program adalah kumpulan proyek-proyek yang saling berhubungan dan sudah di desain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijakan secara keseluruhan).

Menurut Jones beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktifitas sebagai program atau tidak yakni, sebagai berikut :

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program
2. Program biasanya memiliki anggaran, program kadang biasanya di indentifikasikan melalui anggaran
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

2.2. Implementasi

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh Pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan Negara tersebut karena tidak dilaksanakan. Bahkan menurut Huntington (dalam Mutiarin : 2015) perbedaan yang paling penting antara suatu Negara dengan Negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan Negara itu untuk melaksanakan Pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah *polibiro*, kabinet atau Presiden Negara itu.

Menurut Pasalong (2010:105) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.

2.2.1. Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Secara sederhana kegiatan implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan penjabaran rumusan kebijakan yang bersifat abstrak menjadi tindakan yang bersifat konkrit, atau dengan kata lain pelaksanaan keputusan (formulasi) kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis proses implementasi akan di mulai setelah tujuan-tujuan dan saran-saran telah ditetapkan, program kegiatan telah di susun, serta dana telah tersedia dan disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Abdul Wahab, 2014:123) menjelaskan konsep implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Di dalam mempelajari implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dijalankan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan Negara, baik itu menyangkut usaha-usaha pengaministrasian maupun juga usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa”.

Howleyt dan Ramesh (dalam Dyah Mutiarin, 2014:153) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai *the process whereby programs or policies are carried out, it donates the translation of plans into practice*. (implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan program-program atau kebijakan-kebijakan, yang merupakan upaya penterjemahan dari rencana ke dalam praktek).

2.2.2. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Zainal Abidin (2012:155-157) terdapat pendekatan implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan yang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan:

- a. *Planning of change* yakni perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat internal organisasi
- b. *Planning for change*, yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar.

2. Pendekatan *prosedural/manajerial*

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (*planning, programming, budgeting, supervision, atau programming, evaluation, review technique*). Yang paling penting dalam proses implementasi adalah prioritas dan tata urutan.

3. Pendekatan kewajiban/*behavior*

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplementasikannya.

4. Pendekatan politik

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

2.2.3. Tingkatan dalam Kebijakan Publik

Tingkatan kebijakan publik menurut Thomas R.Dye (dalam Mulyadi : 2014) adalah “*Whatever Governments choose to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan menurut David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai “pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan”. Pengertian lainnya dari kebijakan publik adalah merupakan rumusan keputusan Pemerintah yang menjadi pedoman guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kebijakan Publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Negara dan Pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu. Dalam kehidupan Administrasi Negara, secara formal keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan Perundang-undangan. Masalah publik dapat dibedakan ke dalam masalah prosedural yaitu berhubungan dengan bagaimana pemerintah diorganisasikan dan bagaimana pemerintah melakukan tugas-tugasnya. Dengan melihat definisi tersebut, maka pemahaman mengenai

kebijakan publik dapat disimpulkan menjadi dua pembagian. Pembagian jenis kebijakan publik yang pertama adalah makna dari kebijakan publik, bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan atau dibiarkan. Pembagian jenis kebijakan publik yang kedua adalah bentuknya.

Kebijakan Publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi. Contoh-contoh dari Kebijakan Publik ini yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Gubernur dan Peraturan/keputusan Walikota/Bupati.

Dalam Peraturan tertulis, tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu antara lain:

- a. Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan menjadi falsafah dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan produk pendiri bangsa Indonesia, yang dapat di revisi hanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia.
- b. Kebijakan publik yang kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan ketidak mampuan legislatif, namun menyiratkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislatif bekerja sendiri. Contoh kebijakan publik yang

dibuat bersama antara eksekutif dan legislatif ini adalah Undang-undang dan Peraturan Daerah.

- c. Kebijakan publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Di dalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karena produk dari legislatif berisikan peraturan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana yang dibuat sebagai turunan dari produk peraturan legislatif. Contoh kebijakan publik yang dibuat oleh eksekutif adalah Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Presiden (Keppres/Perpres), Keputusan/Peraturan Menteri (Kepmen/Permen), Keputusan/Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota/Bupati.

Kebijakan publik, dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan, maksud dan tujuan dari kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah atau mencari solusi alternatif dari masalah yang menjadi isu bersama yang berkembang di Masyarakat. Oleh karena itu tidak semua masalah yang berkembang di masyarakat bisa melahirkan satu kebijakan publik, hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan suatu kebijakan publik. Kebijakan publik adalah apa-apa yang diputuskan oleh Pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan oleh Pemerintah baik yang berbentuk Perundang-undangan tertulis maupun tidak tertulis.

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (Said Zainal Abidin, 2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan suatu Undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Adapun contoh jenis kebijakan dalam tingkatan kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Kebijakan umum
 - a. Kebijakan Negara yang bersifat Fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan Nasional
 - b. Wewenang, Presiden bersama-sama dengan DPR dan DPD.
 - c. Bentuk: UUD, UU, Perpu
- 2) Kebijakan pelaksana
 - a. Kebijakan Presiden sebagai pelaksana UU, TAP MPR dan Perpu guna mencapai tujuan
 - b. Wewenang Presiden
 - c. Bentuk: PP, Kepres, Inpres
- 3) Kebijakan teknis
 - a. Sebagai penjabaran dan kebijakan umum sebagai strategis pelaksanaan tugas di bidang tertentu.
 - b. Wewenang, Menteri, Pejabat setingkat Menteri/LNPK

- c. Bentuk: Keputusan, Peraturan, Instruksi pejabat tertentu

Kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya.

2.2.4. Konsep dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang strategis dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Van Meter dan Van Gorn dalam Budi Winarno (2014:102) merumuskan Implementasi Kebijakan Publik sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Menurut Lane, implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *implementation = F (intention, output, outcome)*. Sebagai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan

tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implementation = F, (policy, formator, implementor, initiator, time)*. Grindle (dalam Mutiarin : 2015) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Selanjutnya bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dalam implementasi kebijakan pada umumnya, beberapa faktor eksternal yang biasanya mempersulit implementasi suatu kebijakan antara lain berasal dari kondisi-kondisi berikut:

1. Kondisi fisik, seperti terjadinya perubahan musim atau bencana alam. Dalam banyak hal, kegagalan implementasi kebijakan sebagai akibat dari faktor-faktor alam ini sering dianggap bukan sebagai kegagalan, sekalipun dalam hal-hal tertentu sebenarnya dapat diantisipasi untuk mencegah atau mengurangi risiko yang jauh.
2. Faktor politik, terjadinya perubahan politik yang mengakibatkan pergantian pemerintah dapat mengubah orientasi atau pendekatan dalam implementasi, atau bahkan dapat menimbulkan perubahan terhadap seluruh kebijakan yang telah dibuat.

3. Tabiat, (*Attitude*) dari sekelompok orang yang cenderung tidak sabar menunggu berlangsungnya proses kebijaksanaan dengan sewajarnya dan memaksa melakukan perubahan. Akibatnya terjadi perubahan kebijakan sebelum kebijakan itu dilaksanakan.
4. Terjadi penundaan karena kelambatan atau kekurangan faktor input. Keadaan ini terjadi karena faktor-faktor pendukung yang diharapkan tidak tersedia pada waktu yang dibutuhkan, atau mungkin karena salah satu faktor dalam kombinasi faktor-faktor yang diharapkan tidak cukup.
5. Kelemahan salah satu langkah dalam rangkaian beberapa langkah implementasi.
6. Kelemahan pada kebijaksanaan itu sendiri. Kelemahan ini dapat terjadi karena teori yang melatarbelakangi kebijakan atau asumsi yang dipakai dalam perumusan kebijakan tidak tepat.

2.3. Model Implementasi George C. Edwards III

Menurut Edwards III (1980 dalam Mulyadi : 2014) studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik termasuk di dalamnya kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Adapun secara terperinci Edwards III (1980 dalam Mulyadi : 2014) menjelaskan keempat faktor tersebut sebagai berikut:

1. Komunikasi

Agar implementasi dapat efektif penanggung jawab implementasi sebuah keputusan harus mengetahui apa yang mesti dilakukan. Dalam mengimplementasikan kebijakan, perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus ditransmisikan kepada personal yang tepat dan perintah harus jelas, akurat dan konsisten.

2. Sumber Daya

Yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya *financial*. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Disposisi

Yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam *guideline* program/kebijakan. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan

tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Yaitu menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedure (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka yang kerja yang jelas sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “*virus weberian*”, yang kaku terlalu hirarkis dan birokrasi.

2.4. Teori Kemiskinan

Makna kemiskinan menurut Suparlan (2004:315) kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan

kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Menurut Ritonga (2003:1) memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwayuh wajah, bermatra *multidimensional*.

2.4.1. Ciri-ciri kemiskinan

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (papan, sandang, pangan).
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti :
 - a. Kesehatan
 - b. Pendidikan
 - c. Sanitasi
 - d. Air bersih
 - e. Transportasi
3. Ketiadaan jaminan masa depan (karna tiada investasi untuk pendidikan dan keluarga).

4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun masal
5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.
6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan social masyarakat.
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karna cacat fisik maupun mental
9. Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan social seperti :
 - a. Anak terlantar
 - b. Wanita korban tindak kekerasan rumah tangga (KDRT)
 - c. Janda miskin
 - d. Kelompok marjinal dan terpencil

Konsepsi kemiskinan yang bersifat multidimensional ini kiranya lebih tepat juga digunakan sebagai pisau analisis dalam mendefinisikan kemiskinan dan merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Adapun dimensi kemiskinan menurut Edi Suharto (2005:133) menyangkut beberapa aspek-aspek sebagai berikut :

2.4.2. Dimensi kemiskinan

1. Aspek ekonomi

Secara ekonomi, kemiskinan dapat di definisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat di gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

2. Aspek Politik

Kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (power). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan system politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya.

3. Aspek sosial-psikologis

Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjukkan pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas.

2.5. Pengertian Rumah Layak Huni

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman disebutkan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya. Terkait dengan fasilitas-fasilitas yang akan diperbaiki dari program renovasi rumah tidak layak huni menjadi rumah sehat, bahwa rumah yang sehat harus mempunyai fasilitas-fasilitas.

Pertama penyediaan air bersih yang cukup, pembuangan tinja, pembuangan limbah (air bekas), pembuangan sampah, fasilitas dapur, ruang berkumpul dengan keluarga dan untuk rumah dipedesaan lebih cocok adanya serambi (serambi depan dan belakang). Dan untuk yang memiliki ternak, sebaiknya antara rumah dengan kandang ternak jaraknya harus terpisah untuk menjaga kesehatan.

Menurut Depkes RI (2002), rumah harus memenuhi empat kriteria agar bisa dikatakan sehat yaitu :

- a. Dapat memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, penghawaan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu.
- b. Dapat memenuhi kebutuhan psikologis antara lain privacy yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah.
- c. Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas dari penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan penghawaan yang cukup. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun keadaan dalam rumah, antara lain; posisi garis sepadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar dan tidak cenderung membuat penghuninya jatuh tergelincir.

2.5.1. Rumah Tinggal Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Persyaratan tersebut terdiri dari 9 kriteria khusus.

Rumah tidak layak huni selalu berkaitan dengan aspek kemiskinan karena keterjangkauannya bagi masyarakatnya terhadap rumah dengan 9 kriteria khusus yang dikatakan sebagai rumah tidak layak huni, yaitu:

1. Luas lantai per kapita kota kurang dari empat meter persegi (4 m^2), desa kurang dari 10 m^2

2. Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas.
3. Tidak ada akses MCK.
4. Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, papan, rumbia
5. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara.
6. Tidak memiliki pembagian ruangan.
7. Lantai dari papan bahan tidak permanen ataupun lantai dari tanah.
8. Letak rumah tidak teratur dan berdempetan.
9. Kondisi rusak. Ditambah lagi dengan, saluran pembuangan air yang tidak memenuhi standar.

2.6. Kecamatan

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (tautan: PP Nomor 17 Tahun 2018). Dalam PP ini disebutkan, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

Pembentukan Kecamatan, menurut PP ini, dilakukan melalui: a. pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih; b. penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan lainnya yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi Kecamatan baru. “Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 3 ayat (3) PP ini.

Untuk kepentingan strategis nasional, menurut PP ini, Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota tertentu melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membentuk Kecamatan. Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud meliputi: a. Kecamatan di kepulauan terpencil dan terluar; b. Kecamatan di kawasan perbatasan darat; dan c. Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun penggabungan Kecamatan, menurut PP ini, dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) kecamatan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan apabila: a. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan; b. terdapat kepentingan strategis nasional; dan/atau c. tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh desa/Kelurahan yang akan bergabung. “Kecamatan yang digabung sebagaimana dimaksud dapat menggunakan nama salah satu Kecamatan yang tergabung atau menggunakan nama baru,” bunyi Pasal 8 ayat (3) PP ini.

2.6.1. Tugas Camat

Mengenai Camat dalam memimpin Kecamatan, menurut PP ini, bertugas di antaranya: a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum; b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. mengoordinasikan upaya penyeleggaraan

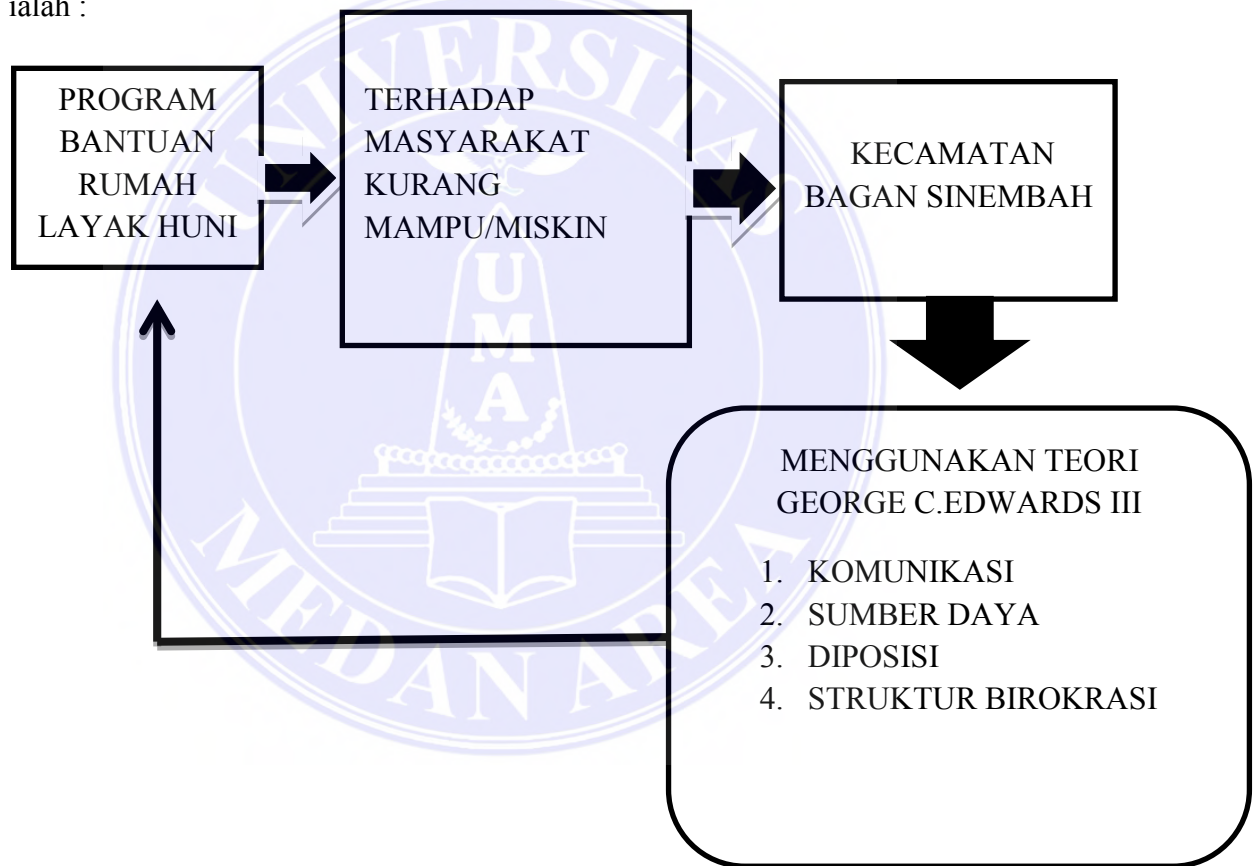
ketentraman dan ketertiban umum; dan d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota, yaitu: a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; dan b. untuk melaksanakan tugas pembantuan. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan. “Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan kriteria: a. proses sederhana; b. objek perizinan berskala kecil; c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan d. tidak memerlukan teknologi tinggi,” bunyi Pasal 11 ayat (3) PP ini. Khusus untuk Camat di kawasan perbatasan Negara yang wilayahnya di luar pos batas lintas Negara, menurut PP ini, dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait kepada Bupati/Walikota.

Selain itu, camat di kawasan perbatasan Negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PP ini juga mengatur mengenai masalah Kelurahan, dari pembentukan hingga kedudukan Kelurahan dan tugas Lurah, termasuk juga masalah pendanaan, dan pakaian dinas Camat dan Lurah.

2.7. Kerangka Pemikiran

Oleh karena itu pada penyusunan paradigma penelitian harus berdasarkan pada kerangka pemikiran. Secara garis besar kerangka pemikiran penulisan skripsi ini adalah, Kecamatan Bagan Sinembah sebagai instansi pemerintahan yang melayani dan membantu program bantuan rumah layak huni kepada warga di Kecamatan Bagan Sinembah, diharapkan mampu memberikan bantuan rumah layak huni kepada warga yang membutuhkan. Adapun kerangka pemikirannya ialah :



Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8. Penelitian yang relevan

1. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Lisaini pada tahun 2010, dengan judul penelitian yaitu “Efektivitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Padang Lawas Utara” dengan pendekatan penelitian secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas program bantuan rumah tidak layak huni oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah tidak efektif. Hasil perhitungan dikatakan tidak efektif dilihat dari ketetapan sasaran sebanyak 1.51, dari ketepatan waktu 0.46, dari tercapainya tujuan sebanyak 0.53, dan dari perubahan nyata sebanyak 0.60.
2. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Dicky Pradana Putra pada tahun 2015, dengan judul penelitian yaitu “Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Sosial Kabupaten Sumenep” dengan pendekatan penelitian secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Kabupaten Sumenep termasuk penerima bantuan tersebut. Pokok permasalahannya adalah terkait dengan keefektifan program tersebut, kesesuaian output dan dana yang dikeluarkan pemerintah menjadi sebuah pertanyaan. Sedangkan dari kuota/jumlah sasaran yang tersedia banyak yang tidak lulus seleksi.

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Zania pada tahun 2017, dengan judul yaitu “Efektivitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos-RTLH di Kota Tegal Tahun 2017” dengan pendekatan penelitian secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya efektivitas program bantuan Sosial RTLH di Kota Tegal rata-rata telah efektif dengan nilai 2,67. Indikator sosialisasi dan pemahaman program sebesar 2.36. indikator ketetapan sasaran sebanyak 3.37. indikator tujuan program sebanyak 2.56. indikator perubahan nyata sebanyak 2.70 dan indikator pemantauan program sebanyak 2.37. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat hambatan antara lain dana bantuan yang dirasa masih belum cukup untuk memperbaiki rumah warga, adanya syarat yang tidak terpenuhi seperti warga yang menolak bantuan sehingga pelaksanaan pun terhambat, kurang meratanya pembagian anggaran di tiap-tiap Kelurahan maupun tiap rumah, waktu pelaksanaan yang terlalu singkat sehingga hasil pengerjaan kurang maksimal, dan sosialisasi program yang kurang sehingga banyak warga yang masih belum memahami tentang program secara rinci.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi dan Waktu penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan obyek yang di teliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data-data, kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi* (Sugiyono, 2014:1)

Pendekatan penelitian kualitatif dilakukan secara proses siklus atau melingkar (*Cyclical*), bukan proses *linier*. Oleh sebab itu penelitian kualitatif juga berpedoman kepada paradigma *pluralistic* atau beragam teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, untuk dapat memberikan rangkaian bukti yang diperlukan untuk meningkatkan validitas data yang dikumpulkan (Spradley dalam Sugiyono, 2011)

Penelitian kualitatif harus memiliki prinsip yaitu peneliti harus menjadi partisipan yang aktif bersama obyek yang diteliti, disini diharapkan peneliti

mampu melihat sesuatu fenomena dilapangan secara struktural dan fungsional (Sudjarwo dalam Sujarweni, 2014)

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. Dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran), penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai *variable* mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Menurut Whitney bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

3.1.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau, tepatnya di jalan Lintas Sumatra Km 8.

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember-Januari 2019.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Data atau informasi yang menjadi bahan baku penelitian untuk diolah merupakan data yang berwujud data primer dan data sekunder.

1) Data primer, merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

a. Observasi

Merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu . Dimana objek dalam penelitian ini ialah masyarakat kurang mampu di Kecamatan Bagan Sinembah yang berjumlah 5.327 jiwa.

Tujuan penelitian ini untuk mengamati dan memahami perilaku kelompok orang maupun individu pada keadaan tertentu. Penelitian jenis ini disahkan untuk menggunakan kamera tersembunyi atau instrument lain yang sama sekali tidak diketahui oleh orang yang diamati (subjek yang diteliti).

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Hadi dalam Sujarweni, 2014)

b. Wawancara

Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara Tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebagainya.

Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian, informan penelitian ini meliputi beberapa macam sebagai berikut :

1. Informan Kunci

Informan kunci ialah orang-orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah :

- a. Camat Bagan Sinembah
- b. Kepala Desa
- c. Penerima rumah bantuan

2. Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu orang yang memberikan informasi walaupun tidak terlibat di dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah pegawai Kecamatan Bagan Sinembah.

- 2) Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen) berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi - referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian. Sumber data sekunder dapat dimanfaatkan untuk menguji menafsirkan bahkan meramalkan tentang organisasi tempat penelitian, data - data yang berhubungan dengan subjek yang diteliti serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

1.3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana menurut Miles dan Huberman (2010 : 255) analisis data kualitatif tentang mempergunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluaskan atau dideskripsikan. Analisis data kualitatif bertolak dari fakta atau informasi dilapangan kemudian diseleksi dan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penuh makna (Sujana dalam Sujarweni, 2014)

Sedangkan untuk analisis data sangat perlu, sebagaimana dinyatakan analisis data sebagai proses yang mencari usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pad aide itu (Bogdan dan Taylor,2010:254).

Analisis data dalam metode kualitatif dilakukan secara bersamaan melalui proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Humberman (2010 : 255) analisis data meliputi :

1. Pengumpulan Data

Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis data yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Pengambilan keputusan atau verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan pengambilan keputusan dan verifikasi. Untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan lain sebagainya. Jadi dari data tersebut diusahakan untuk mengambil suatu kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- a. Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tidak berjalan dengan optimal, jika dilihat dari penyampaian sosialisasi yang tidak menyeluruh dan tidak tepat sasaran, dan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang belum memadai serta kurangnya pemahaman dan keahlian aparat pelaksana dalam pembangunan.
- b. Hambatan dalam Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau ialah terkait sumber daya yang dilihat dari sumber daya manusia yang tidak memiliki keahlian dan kemampuan dalam pembangunan rumah layak huni, tidak tepatnya sasaran dalam pelaksanaan pembangunan rumah kepada masyarakat kurang mampu, fasilitas dalam pembangunan rumah layak huni tidak memadai, dan minimnya anggaran dalam pembangunan rumah layak huni serta dari Dimensi Struktur Birokrasi terkait tidak adanya SOP dalam pembangunan tersebut.

5.2.Saran

Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

- a. Disarankan kepada Aparat Kecamatan Bagan Sinembah meningkatkan sosialisasi program bantuan rumah sederhana layak huni kepada Lurah dan masyarakat.
- b. Disarankan kepada tim pelaksana kegiatan program bantuan rumah layak huni dimulai dari tingkat pusat sampai masyarakat agar menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan keahlian dan kedudukannya, sehingga tahapan-tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program rumah sederhana layak huni ini dapat menyentuh masyarakat yang kurang mampu serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.
- c. Disarankan kepada aparat pelaksana memiliki komitmen yang jelas dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan program. Sehingga program bantuan rumah layak huni dapat berjalan secara maksimal.
- d. Pemerintah Daerah seharusnya membuat *Standar Operasional Procedure* (SOP) sebagai acuan bagi setiap aparat dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya masing-masing agar pelaksanaan program bantuan rumah sederhana layak huni berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abidin, Zainal Said. 2004. *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- _____. 2012. *Kebijakan Publik : Edisi Kedua*. Salemba Humanika, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia. Jakarta.
- Budiani, Ni Wayan. 2007. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. Input Jurnal Ekonomi dan Sosial.
- Duun, Wiliam N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press: Bandung.
- Dwiyanto, Agus dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly inc: Washington.
- Edward III, George C. 2011. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly inc: Washington.
- Haryadi, 2011. *Evaluasi Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat. Perspektif*, PPSK, Yogyakarta
- Indrawijaya, Ibrahim, Adam. 2010. *Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi*. PT. Refika Aditama, Bandung
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media
- Miles dan Humberma. 2010. *Metode Penelitian*. Alfabeta : Yogyakarta.
- Muanley, Yonas. 2018. *Teori Efektivitas*. Diakses tanggal 10 Agustus 2018
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Mutiarin, Dyah. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Mulyadi, Deddy. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta CV: Bandung.
- Parson, Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Analisis Kebijakan*, diterjemahkan oleh : Tri Wibowo, Kencana : Jakarta.
- Sujarweni, Wiratna . 2014. *Metodologi penelitian*. Pustakabarupress, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*
Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan social dan Pekerjaan Sosial*, Cetakan 3. PT Rafika Aditama, Bandung

Dasar Hukum :

- UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat (7) No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
- Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Bupati No 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksana Pembangunan Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa Kabupaten Rokan Hilir

Jurnal :

- Penelitian Rahmawati Zania, 2017 tentang Efektivitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (BANSOS-RTLH) di Kota Tegal Tahun 2017
- Penelitian Dicky Pradana Putra, 2015 tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Sosial Kabupaten Sumenep
- Penelitian Lisaini, 2010 tentang Efektivitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Padang Lawas Utara

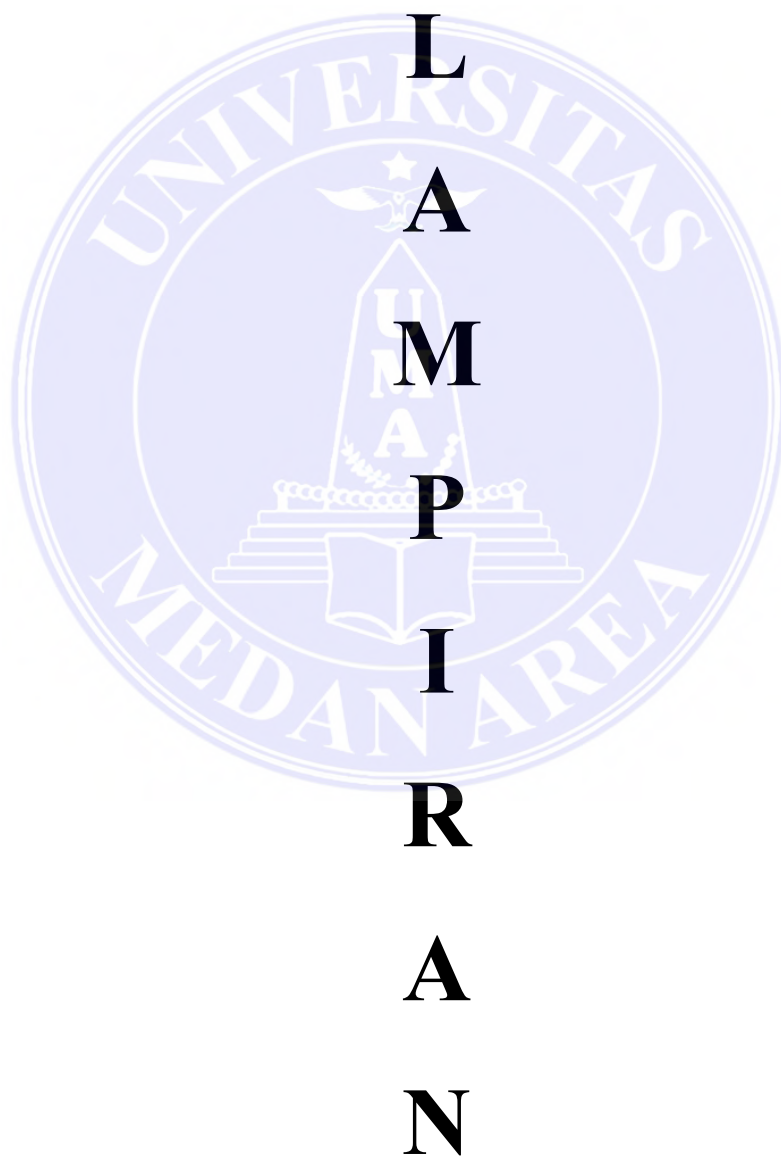
Penelitian Sastries, Ishardino, Wahyu 2011. Tentang Efektivitas Program Pemberdayaan Pemuda Pada Organisasi Kepemudaan Al Fatih Ibadurahman Kota Bekasi.

Penelitian Bakar, Abu 2015. Tentang Evaluasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dalam Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan

Sumber Lainnya :

1. Sekretaris Camat : Bapak H.Darsono, SE
2. Kasi Pembangunan : M.Hasbi
3. Masyarakat :
 - a. Sulasmi
 - b. Selamat
 - c. Legiman





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

Access From (repository.uma.ac.id)

Lampiran I :

**Daftar Pemohon Bantuan Program Rumah Layak Huni di Kecamatan
Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir
Pada Tahun 2016**

No	Kelurahan Kepenghuluan	Nama	Usia	Pekerjaan	Jumlah Tanggungan	Penghasilan/ perbulan/Rp
1	Kel. Bahtera Makmur Kota	Suparmi	30 Thn	Petani	3 orang	Rp.500.000,--Rp. 1.000.000
		Adi R	65 Thn	Buruh	6 orang	Rp.500.000,--Rp.1.000.000
		Ibrahim	50 Thn	Petani	5 orang	Rp.500.000,--Rp.1.000.000
		Suriyad	43 Thn	Petani	3 orang	Rp.1.000.000-Rp.1.200.000
		Lukman	54 Thn	Buruh	7 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
2	Kep. Sukamaju	Sumarto	37 Thn	Pedagang	3 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Mamat	66 Thn	Petani	5 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Sabari	44 Thn	Petani	7 orang	Rp.1.000.000-Rp.1.200.000
		Sabirin	55 Thn	Petani	4 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Rudi Hartono	46 Thn	Petani	2 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
3	Kep. Bakti Jaya	Sulasmi	28 Thn	Pedagang	1 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Mukti	60 Thn	Buruh	5 orang	Rp.1.000.000-Rp.1.200.000
		Andi	43 Thn	Buruh	6 orang	Rp.1.000.000-Rp.1.200.000
		Mariono	24 Thn	Petani	2 orang	Rp.1.000.000-Rp.1.200.000
		Syarif	40 Thn	Petani	3 orang	Rp.1.000.000-Rp.1.200.000
4	Kep. Bagan Sapta Permai	Sugiono	29 Thn	Buruh	2 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Sugianto	54 Thn	Buruh	5 orang	Rp500.000-Rp.1.000.000
		Hamdan	30 Thn	Petani	6 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Mariati M	53 Thn	Pedagang	2 orang	Rp.1.000.000-Rp.1.500.000
		Ahmad	66 Thn	Pedagang	7 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
5	Kep. Pelita	Syair	47 Thn	Pedagang	2 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Misdi	50 Thn	Petani	4 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Nail	46 Thn	Buruh	6 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Rahmad	60 Thn	Buruh	7 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Hadi	78 Thn	Petani	6 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
6	Kel. Bagan Batu Kota	Sofyan Amnador	45 Thn	Pedagang	4 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Sofyan	66 Thn	Pedagang	5 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Heri	45 Thn	Buruh	6 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Wiji	45 Thn	Petani	9 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000

		Pirgong Siregar	50 Thn	Pedagang	3 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
7	Kep. Gelora	Sumini	66 Thn	Petani	4 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Nuryasin	47 Thn	Petani	3 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Salman	66 Thn	Pedagang	7 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Warno	58 Thn	Pedagang	5 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Sukiman	43 Thn	Petani	6 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
8	Kep. Bagan Batu Barat	Saraiah	67 Thn	Petani	4 Orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Legiman	44 Thn	Buruh	3 Orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Daryono	60 Thn	Petani	1 Orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Razak	55 Thn	Petani	3 Orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Gino	60 Thn	Petani	1 Orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
9	Kep. Bagan Batu	Nasiah	35 Thn	Petani	1 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Priatman	54 Thn	Petani	5 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Rahman	44 Thn	Pedagang	6 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Darwis Siphahutar	49 Thn	Pedagang	2 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Jarwo	47 Thn	Petani	3 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
10	Kep. Bahtera Makmur	Sujari	44 Thn	Petani	3 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Surawan	54 Thn	Pedagang	5 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Bambang	56 Thn	Petani	6 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Wardi	60 Thn	Petani	7 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Herman	43 Thn	Petani	5 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
11	Kep. Bagan Manunggal	Isni Agustina	49 Thn	Pedagang	2 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Rujito	45 Thn	Petani	4 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Paijo	60 Thn	Petani	7 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Parman	43 Thn	Petani	4 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
12	Kep. Bakti Makmur	Baharudin	55 Thn	Petani	3 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Zainal	66 Thn	Petani	6 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Nawir	64 Thn	Buruh	7 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Husin	55 Thn	Buruh	5 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
13	Kep. Jaya Agung	Supinem	57 Thn	Petani	4 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Marpaun	44 Thn	Petani	5 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Ruslan	65 Thn	Buruh	6 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Sinaga	67 Thn	Buruh	5 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Timah	40 Thn	Pedagang	2 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
14	Kep. Bhayangkara Jaya	Wahyudi	41 Thn	Petani	2 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Awik	60 Thn	Buruh	4 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Murdian	56 Thn	Buruh	7 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Senah	39 Thn	Buruh	2 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Liwardi	54 Thn	Petani	4 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
15	Kep. Meranti Makmur	Sutimin	38 Thn	Pedagang	2 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Syarif	56 Thn	Buruh	6 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Abdi	55 Thn	Petani	2 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Jera	45 Thn	Petani	3 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Rosawun	44 Thn	Petani	2 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
16	Kep. Jadi	Suratman	47 Thn	Petani	2 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000

	Makmur					
		Pardi	45 Thn	Petani	3 orang	Rp. 1.200.000-Rp. 1.400.000
		Ramlan	55 Thn	Buruh	5 orang	Rp. 500.000-Rp. 1.000.000
		Sugiem	34 Thn	Buruh	2 orang	Rp. 500.000-Rp. 1.000.000
		Halimah	54 Thn	Buruh	5 orang	Rp. 500.000-Rp. 1.000.000
17	Kep. Murini Makmur	Saminah	40 Thn	Petani	1 orang	Rp. 1.200.000-Rp. 1.400.000
		Yuda	40 Thn	Buruh	6 orang	Rp. 1.200.000-Rp. 1.400.000
		Adlin	50 Thn	Petani	5 orang	Rp. 1.200.000-Rp. 1.400.000
		Selamet	37 Thn	Pedagang	2 orang	Rp. 1.200.000-Rp. 1.400.000
		Parjo	54 Thn	Petani	4 orang	Rp. 500.000-Rp. 1.000.000

(Sumber data : Kantor Camat Bagan Sinembah Tahun 2016)



Lampiran II :

**Daftar Penerima Bantuan Program Rumah Layak Huni di Kecamatan
Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir
Pada Tahun 2016**

No	Kelurahan Kepenghuluan	Nama	Usia	Pekerjaan	Jumlah Tanggungan	Penghasilan/ perbulan
1	Kel. Bahtera Makmur Kota	Suparmi	30 Thn	Petani	3 orang	Rp.500.000,--Rp.1.000.000
		Suriyad	43 Thn	Petani	3 orang	Rp.1.000.000-Rp.1.200.000
2	Kep. Suka Maju	Sumarto	37 Thn	Pedagang	3 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Rudi Hartono	46 Thn	Petani	2 orang	Rp.500.000-Rp1.000.000
3	Kep. Bakti Jaya	Sulasmi	28 Thn	Pedagang	1 orang	Rp.500.000-Rp1.000.000
		Mariono	24 Thn	Petani	2 orang	Rp.1.000.000-Rp1.200.000
4	Kep. Bagan Sapta Permai	Sugiono	29 Thn	Buruh	2 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Mariati	45 Thn	Pedagang	2 orang	Rp.1.000.000Rp1.500.000
5	Kep. Pelita	Syair	62 Thn	Pedagang	3 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Misdi	51 Thn	Petani	5 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
6	Kel. Bagan Batu Kota	Sofyan Amnador	45 Thn	Pedagang	4 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Pirgong Siregar	50 Thn	Pedagang	3 orang	Rp.1.200.000-Rp1.400.000
7	Kep. Gelora	Sumini	66 Thn	Petani	4 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Nuryasin	47 Thn	Petani	3 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
8	Kep. Bagan Batu Barat	Saraiah	67 Thn	Petani	4 Orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Legiman	44 Thn	Buruh	3 Orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
9	Kep. Bagan Batu	Nasiah	35 Thn	Petani	1 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
10	Kep. Bahtera Makmur	Sujari	44 Thn	Petani	2 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
11	Kep. Bagan Manunggal	Isni Agustina	49 Thn	Pedagang	2 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
12	Kep. Bakti Makmur	Baharud din	55 Thn	Petani	3 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Nawir	64 Thn	Buruh	7 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
13	Kep. Jaya Agung	Supinem	57 Thn	Petani	4 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
		Timah	40 Thn	Pedagang	2 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
14	Kep. Bhayangkara Jaya	Wahyudi	41 Thn	Petani	2 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Senah	39 Thn	Buruh	2 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000

15	Kep. Meranti Makmur	Sutimin	38 Thn	Pedagang	2 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Rosawun	44 Thn	Petani	2 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
16	Kep. Jadi Makmur	Suratman	47 Thn	Petani	2 orang	Rp.500.000-Rp1.000.000
		Sugiem	34 Thn	Buruh	2 orang	Rp.500.000-Rp.1.000.000
17	Kep. Murini Makmur	Saminah	40 Thn	Petani	1 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000
		Selamet	37 Thn	Pedagang	2 orang	Rp.1.200.000-Rp.1.400.000

(Sumber data : Kantor Camat Bagan Sinembah Tahun 2016)



Lampiran III

Bersama Sekretaris Camat : Bapak H.Darsono, SE, Kamis : 6 Desember 2018
Pukul 10:00 Wib)



Contoh Bantuan rumah layak huni kepada masyarakat kurang mampu



Lampiran IV :

**Struktur Organisasi Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir,
Provinsi Riau**

